

Adaptive Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik

Nanda Syarifudin Fanani¹, Ertien Rining Nawangsari²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

nandasyarifudin93760@gmail.com¹, ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

In the practice of Adaptive Governance carried out by the Village Government by utilizing the potential of natural resources that have built the democratization of the village economy or turning potential into profit through BUMDes. The approach method used in the research is descriptive qualitative. Data were obtained through observation, interviews, documentation. From the results obtained, it shows that the practice of adaptive governance carried out by BUMDes Desa Sekapuk has been effective in achieving the desired cooperation, because in the output assessment, namely the existence of (1) in the system, BUMDes Desa Sekapuk can be said to be part of a polycentric and multi-layered institution because in a polycentric system there is a multi-stakeholder governance pattern. (2) participation and collaboration since the BUMDes was reactivated after a long period of non-operation is now quite good and effective in collaboration. (3) independent and networked organization, the governance of BUMDes Desa Sekapuk can be said to be an arena for all parties to offer ideas, ideas, and innovations. (4) learning and innovation have been very good where Mr. Abdul Halim himself as the Village Head and also the actors of BUMDes Desa Sekapuk learned a lot from an experience at that time.

Keywords: Adaptive Governace, BUMDes, Sekapuk Village

ABSTRAK

Praktik *Adaptive Governace* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang telah membangun demokratisasi ekonomi desa atau mengubah potensi menjadi profit melalui BUMDes. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik *adaptive governace* yang dilakukan oleh BUMDes Desa Sekapuk sudah efektif dalam mencapai kerja sama yang di inginkan, karena dalam penilaian keluaran (*output*) yaitu adanya (1) pada sistemnya BUMDes Desa Sekapuk dapat dikatakan sebagai bagian dari institusi yang polisentris dan berlapis-lapis karena pada sistem polisentris terdapat pola tata kelola multipihak. (2) partisipasi dan kolaborasi semenjak BUMDes diaktifkan lagi setelah lama tidak beroperasi kini dalam kolaborasi kerja sama saat ini sudah cukup baik dan efektif. (3) organisasi mandiri dan berjejaring ini tata kelola BUMDes Desa Sekapuk sudah bisa dikatakan dapat menjadi arena bagi semua pihak untuk menawarkan gagasan, ide, dan inovasi. (4) pembelajaran dan inovasi sudah baik sekali dimana bapak Abdul Halim sendiri selaku Kepala Desa dan juga para aktor BUMDes Desa Sekapuk belajar banyak dari sebuah pengalaman pada saat itu.

Kata Kunci: *Adaptive Governace*, BUMDes, Desa Sekapuk

PENDAHULUAN

Berkenaan dengan pengembangan dan tata kelola BUMDes, khususnya di daerah Kabupaten Gresik, terdapat BUMDes yang cukup berprestasi dan dapat dijadikan sebagai *best practice* karena berhasil meraih omset sebesar Rp 11 miliar dan memberikan PADes kepada desa lebih Rp 2 miliar, sehingga desa ini memiliki sebutan desa miliarder BUMDes tersebut adalah BUMDes Sekapuk, Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Secara historis, desa Sekapuk pada awalnya adalah desa miskin dan terpencil di Kabupaten Gresik, kondisi ini ditunjukkan dengan data IDM 0,55% pada tahun 2017. Sengkarut permasalahan banyak menyelimuti desa ini, mulai dari permasalahan kemiskinan, wilayah kotor, bau, dan kumuh karena menjadi tempat pembuangan sampah hingga menggunggung. Lebih-lebih Sekapuk terkenal dengan area banjir dan ancaman longsor karena aktivitas penambangan batu kapur. Selain itu, batu kapur yang setiap hari dikeruk juga lama-lama akan memunculkan ancaman dan bencana bagi warga sekitar ditambah batu kapur yang sudah ditambang tidak akan bisa diperbarui. Saat itulah, masyarakat berpikir untuk menangkap potensi bekas penambangan batu kapur tersebut.

Pada tahun 2018 pemerintah desa melakukan gerakan reformatif dan upaya rekonstruksi peningkatan kinerja dan tata kelola BUMDes, perbaikan infrastruktur, dan pembinaan-pemberdayaan ekonomi warga desa. Dulunya Desa Sekapuk masuk ke dalam golongan desa yang miskin, bahkan kesenjangan sosial di desa tersebut sangat tinggi dan rawan konflik (<https://jateng.tribunnews.com>). Upaya reformatif dan rekonstruktif tersebut, membuahkan hasil yang memuaskan. Kendati, pasca terpilihnya Kepala Desa baru, yakni Abdul Halim pada tahun 2018 telah membawa perubahan dan spirit gotong royong yang menggugah kesadaran warga desa dalam pembelajaran dan inovasi, yang memberikan keberhasilan dalam upaya meningkatkan Desa Sekapuk daripada desa lain melalui BUMDesnya. Pasalnya Abdul Halim, telah mengubah kawasan residu sisa pertambangan kapur yang direkonstruksi menjadi sebuah destinasi hiburan disebut Selo Tirto Giri (Segiti). Pembangunan obyek wisata tersebut merupakan hasil iuran warga dan pemerintah desa. Sebutan desa miliarder bukan hanya sebatas slogan atau jargon semata, dikarenakan melalui PADes yang tinggi melalui BUMDes, desa Sekapuk mampu memberikan beasiswa atau biaya pendidikan bagi anak yatim atau kurang mampu hingga kuliah, merenovasi jalan yang kumuh, bahkan ada juga program bedah rumah (<https://jadesta.kemenparekraf.go.id>). Berikut pendapatan asli Desa Sekapuk dari tahun 2019-2022:

Tabel 1. Pendapatan Asli Desa Sekapuk

No.	Tahun	Pendapatan Asli Desa (Rp)
1.	2019	931.992
2.	2020	2.047.181.000
3.	2021	3.779.783.000
4.	2022	7.800.000.000

Sumber: diolah Peneliti dari data Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir Desa Sekapuk memperoleh hasil pendapatan desa yang meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa Desa Sekapuk dapat berkembang dengan baik. Melihat juga pada Desa Sekapuk yang telah menyandang status desa mandiri dengan IDM 0,89%. (<https://idm.kemendesa.go.id>). Status sebagai desa mandiri ini juga telah menghantarkan Desa Sekapuk mendapatkan beberapa penghargaan, seperti halnya Anugrah Times Indonesia, *The Best Potential Destination on Artificial 2020*, *The Most Innovative Leader 2021*, Desa Tanpa Korupsi, terlebih desa ini menjadi desa peringkat satu oleh BRI dalam Desa Brilian. Hal tersebut merupakan kerja keras Pemerintah Desa Sekapuk dalam mengelola BUMDes, yang mana BUMDes Sekapuk saat ini memiliki 7 (tujuh) unit usaha. Dan di tahun 2022 ini sedang dalam proses pembangunan wisata kedua agrowisata dengan konsep edukasi pertanian dan perkebunan menggunakan sistem tabungan investasi (www.bumdessekapuk.com).

Tabel 2. Unit Usaha BUMDes Desa Sekapuk

No.	Unit Usaha
1.	Unit Multi Jasa
2.	Unit Kebersihan desa
3.	Unit Pengelolaan air masyarakat (PAM)
4.	Unit Tambang
5.	Unit Pariwisata Desa
6.	Unit Sport

Sumber: www.bumdessekapuk.com, (2021)

Praktik *adaptive governace* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sekapuk, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang telah membangun demokratisasi ekonomi desa atau mengubah potensi menjadi profit melalui BUMDes. Dalam hal ini dari banyaknya BUMDES di Kabupaten Gresik hanya BUMDes Desa Sekapuk yang nyatanya berhasil sebagai organisasi mandiri dan berjejaring dalam menjembatani cakupan yang lebih luas daripada organisasi pembatas. Organisasi ini menjadi penghubung yang mempertemukan berbagai aktor, menciptakan arena sosial, dan memfasilitasi dan mengendalikan proses pengelolaan adaptif. Bahkan saat pandemi COVID-19-pun desa ini mampu bertahan dari gempuran wabah tersebut. Pada praktiknya momentum untuk berbenah dan beradaptasi khususnya saat pandemi COVID-19 merupakan pintu untuk menciptakan kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama. Janssen dan Voort, menyebutkan bahwa *adaptive governance* bukanlah sebuah metode, melainkan refleksi oleh pemerintah-birokrasi atau sistem pemerintahan yang lebih luas, sehingga memungkinkan beradaptasi dengan kehendak publik. *Adaptive governance* berkenaan dengan teori kontingensi yang difokuskan pada kondisi dimana metode tertentu dapat efektif atau tidak (Janssen & Voort, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana praktik *adaptive governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sekapuk yang dulunya merupakan desa miskin diantara desa-desa

lain di Kabupaten Gresik, kini melalui BUMDes mampu mewujudkan kemandirian desa. Bahkan melalui BUMDes tersebut PADes Desa Sekapuk secara nominal lebih besar dari alokasi Dana Desa. Sehingga menarik, praktik penyesuaian dan adaptasi yang dilakukan dapat menjadi sebuah referensi bagi desa-desa lain di Indonesia, bahwa sejatinya sumber daya di desa bisa dimanfaatkan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing desa. Kendati demikian, sebagaimana penulis dijelaskan di atas, paradigma pembangunan desa adalah sebagai *development subject*, memiliki hak untuk mengelola segala potensi yang ada yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian *Adaptive Governance* Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mencapai Kemandirian Desa di BUMDes Sekapuk, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Kendati disebabkan penelitian kualitatif mempunyai mekanisme penelitian dengan menghasilkan olahan data deskriptif berupa perkataan tertulis berdasarkan narasumber. Serta peneliti memiliki hak untuk memberikan pertanyaan lebih luas (Moelong, 2019)

Strategi atau pendekatan dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan mekanisme penelitian yang menempatkan seorang peneliti mengidentifikasi dan mengamati fenomena, kasus, atau peristiwa. Kemudian peristiwa diberikan tenggat oleh sebuah masa atau *time bound* (Fadli, 2021). Pendekatan deskriptif kualitatif juga menempatkan peneliti dalam penelitian melakukan investigasi secara empiris atas peristiwa atau fenomena. Penggunaan pendekatan ini relevan digunakan pada pokok penelitian yang berkenaan dengan pertanyaan “bagaimana”. Selain itu deskriptif kualitatif cocok digunakan ketika penelitian peristiwa masa kini, serta dapat digunakan untuk mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci. (Adlini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dari hasil temuan penelitian sesuai dengan perumusan masalah yakni mengetahui bagaimana praktik *Adaptive Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik, dengan fokus penelitian berdasarkan *adaptive governance* dari Djalante et,al (2011) yang memiliki 4 dimensi meliputi Institusi polisentris dan berlapis-lapis, Partisipasi dan kolaborasi, Organisasi mandiri dan berjejaring, Pembelajaran dan inovasi.

1. Institusi polisentris dan berlapis-lapis

Berdasarkan temuan di lapangan melihat pada sistemnya BUMDes Desa Sekapuk dapat dikatakan sebagai bagian dari institusi yang polisentris dan berlapis-lapis karena pada sistem polisentris terdapat pola tata kelola multipihak, dimana pentingnya selain BUMDes pihak-pihak lain juga terlibat seperti Pokdarwis, perangkat Desa Sekapuk, ketua RT dan RW, serta jajaran Karangtaruna untuk

mendefinisikan masalah dan mengembangkan masalah yang dapat mereka selesaikan bersama masyarakat. Proses ini tidak mudah untuk diterapkan dalam masyarakat, sebagai contoh sebuah ide yang disampaikan dalam sebuah program tentang pernyataan gagasan dari berbagai pihak dapat menimbulkan perasaan negatif, seperti kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap pihak yang terlihat sangat ambisius dan tergesa-gesa dalam membangun Desa Sekapuk dengan *Adaptive Governance*.

Pada konteks ini sangat mempengaruhi terjadinya *Adaptive Governance* dimana pengelolaan unit usaha ini, terdapat suatu perbedaan dengan tata kelola lembaga yang umum terjadi di mana umumnya adanya proses diskusi dan pengambilan keputusan secara kolektif kemudian memunculkan suatu bentuk pemecahan masalah secara kolektif (*kolektif problem solving*) yang bermuara pada suatu hasil keputusan yang telah dirumuskan serta disepakati oleh berbagai pihak yang ada (*kolektif decision making*). Kemudian didukung juga oleh pendapat Mukhlis, (2016) dalam Fitriani et al, (2023) menjelaskan bahwa keterkaitan antara fitur utama tata kelola adaptif dapat membantu dalam pengembangan ketahanan desa dan perkotaan yang berkelanjutan, terutama terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim.

2. Partisipasi dan kolaborasi

Berdasarkan temuan di lapangan pada partisipasi dan kolaborasi, semenjak BUMDes diaktifkan lagi setelah lama tidak beroperasi kini dalam kolaborasi kerja sama saat ini adalah kepemimpinan Abdul Halim, Kepala Desa Sekapuk. Setiap tindakan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan untuk mengatasi kesulitan dan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara para wisatawan Setigi. Beberapa kebijakan dibuat salah satunya yaitu Taplus Invest, hal ini merupakan upaya untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di Desa Sekapuk. Tentu saja, dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk pengembangan destinasi wisata Setigi. Untuk itu, Taplus Invest didirikan sebagai wadah bagi masyarakat Sekapuk untuk menabung dan berinvestasi, atau lebih tepatnya, menjadi warga yang terlibat dalam pengembangan wisata.

Banyaknya kerja sama yang baik dibangun antara *stakeholder* perangkat desa, dan pihak BUMDes terhadap unit-unit usaha yang dikelola, diantaranya yaitu Taplus Invest, kebersihan desa, pertambangan dan wisata. Bahkan pemerintah Desa Sekapuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mengatur pariwisata desa. Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan Peraturan Desa (Perdes) adalah dua jenis peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sekapuk. Salah satu dari tujuh unit usaha yang membentuk BUMDesa Sekapuk adalah Unit Pariwisata, sesuai dengan Perdes No. 04/2018 tentang BUMDesa. Kesepakatan yang dituangkan dalam Perdes No. 06/2018 tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Desa Sekapuk menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di desa tersebut.

3. Organisasi mandiri dan berjejaring

Dalam konteks tata kelola BUMDes Desa Sekapuk idealnya dapat menjadi arena bagi semua pihak untuk menawarkan gagasan, ide, dan inovasi serta mampu menghasilkan keputusan secara bersama-sama. Dalam hal ini, pada konteks setiap unit usaha proses pemecahan masalah tidak hanya oleh BUMDes saja, tetapi secara bersama sudah mulai dibangun dengan adanya musyawarah jika terjadi permasalahan dan hal ini telah melembaga pada setiap *stakeholder* yang ada. Fenomena tersebut didukung dengan beberapa temuan di lapangan seperti pada saat ini, pemerintah desa dan BUMDes melakukan diskusi bersama dengan semua pihak yang terlibat hingga akhirnya tercapai kesepakatan untuk mencari solusi, yaitu dengan membentuk Taplus Investasi. Bahkan untuk masalah-masalah sederhana sekalipun, pemecahan masalah bersama selalu diupayakan pada setiap unit usaha.

Peran BUMDes menjadi sangat penting dalam situasi ini dan dapat meningkatkan proses kolaboratif. Rasa saling ketergantungan antar pemangku kepentingan tidak dapat terwujud tanpa struktur manajemen ini karena mereka tidak merasa saling membutuhkan dan tidak dapat menyuarakan saran dan pendapat mereka, yang juga menghalangi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan unit usaha Desa Sekapuk. Sulit untuk mewujudkan rasa saling ketergantungan di antara para pemangku kepentingan tanpa adanya suara yang terakomodasi dengan baik. Seperti diadakannya diskusi tingkat desa secara rutin yang dilaksanakan di Balai Desa setiap tanggal 1 setiap bulannya. Diskusi ini sangat informatif bagi semua pihak yang terlibat di Desa Sekapuk. Pertemuan ini wajib dihadiri oleh perwakilan dari BUMDesa Sekapuk, perangkat Desa Sekapuk, ketua RT dan RW, serta jajaran Karangtaruna. Kehadiran dalam rapat-rapat ini wajib, dan pemerintah Desa Sekapuk akan memberi tahu secara resmi kepada mereka yang tidak hadir. Karena mereka telah memberikan wewenang kepada ketua RT masing-masing atas masalah yang dibahas di balai desa, masyarakat Desa Sekapuk tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi. Di sisi lain, rekomendasi biasanya disampaikan secara informal melalui perwakilan pemimpin masing-masing komponen dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pembelajaran dan inovasi

Teori yang disampaikan oleh Djalante et,al (2011) mengenai pembelajaran dimana yang terjadi di lapangan bahwa, bapak Abdul Halim selaku Kepala Desa dan juga para aktor BUMDes Desa Sekapuk sendiri mengambil dari sebuah pengalaman pada saat itu tidak ada unsur paksaan dalam kerja sama ini dan setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk menolak bekerja sama. Dalam pengelolaan ini ada unit PAM yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Desa Sekapuk, dengan total untuk saat ini ada 806 saluran yang mengalir ke Desa Sekapuk. Sedangkan dalam unit Usport untuk ke depannya sudah berpindah kebijakan yaitu ke pemerintah desa atau lebih tepatnya di kelola langsung oleh pihak karang taruna. Untuk sejauh ini Usport sendiri mampu berkembang dengan baik dengan mendapatkan total ada 100 atlet yang sudah berpartisipasi. Kedepannya demi mewujudkan tujuan utamanya adalah untuk memperluas dan pemeratakan ekonomi

desa secara adil, maka bentuknya adalah melalui pembangunan infrastruktur yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh warga. Adanya hal tersebut nanti bisa ditunjukkan dengan tidak memberikan perlakuan khusus atau pengecualian kepada masyarakat yang dikecualikan.

Inovasi BUMDes yang baru saja diaktifkan kembali ini telah berhasil menerapkan sejumlah inovasi, seperti memasukkan ide wisata halal. Jadi untuk Unit Wisata atau lebih dikenal Wisata Setigi melakukan upaya inovasi untuk menarik banyak pengunjung dari seluruh Indonesia. Selain itu, pengalaman juga membantu anggota BUMDes untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko, strategi pengembangan, dan cara menjalankan usaha dengan lebih efisien. Sejalan dengan penemuan tersebut menurut (Djojo, 2013) mengatakan bahwa kompetensi, pengalaman, dan pembelajaran inovasi dari seorang pengusaha dapat memengaruhi kesuksesan dalam berwirausaha atau keberlangsungan hidup organisasi, selain memengaruhi kemampuan berinovasi. Kompetensi, pengalaman, dan pembelajaran inovasi dapat dijadikan sebagai variabel bebas jika akan dilakukan penelitian secara empiris. Sedangkan kemampuan berinovasi yang dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, dan pembelajaran inovasi juga dapat memengaruhi keberlangsungan hidup organisasi atau kesuksesan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai *Adaptive Governance* Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mencapai Kemandirian Desa di BUMDes Sekapuk, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik berdasarkan 4 (empat) dimensi menurut Djalante et.al (2011) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Institusi Polisentris dan Berlapis-lapis

Implementasi *Adaptive Governance* dalam pengelolaan BUMDes Desa Sekapuk sudah cukup baik dalam melaksanakan sistem polisentris dan berlapis lapis. Pengambilan kebijakan dalam setiap unit usaha, para pelaksana dari BUMDes sampai masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak BUMDes, Pokdarwis, perangkat Desa Sekapuk, ketua RT dan RW, serta jajarannya Karangtaruna melakukan secara bersama untuk mendefinisikan masalah dan mengembangkan masalah yang dapat mereka selesaikan bersama. Namun banyaknya pihak yang ikut dalam pengambilan keputusan, sangat besar kemungkinan untuk mengalami perbedaan pendapat sehingga sulit untuk mendapat titik tengah dan pemecahan masalah.

2. Partisipasi dan Kolaborasi

Partisipasi dan kolaborasi semenjak BUMDes diaktifkan, dalam penerapan implementasi *Adaptive Governance* sudah cukup baik dan efektif. Setiap tindakan yang dilakukan baik BUMDes, pihak terkait seperti Pokdarwis dan masyarakat Desa Sekapuk ikut terlibat dalam memajukan program-program yang dijalankan. Beberapa kebijakan dibuat untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dengan Taplus Invest, merupakan upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat

untuk memajukan Desa Sekapuk khususnya di unit wisata. Namun penerapan kebijakannya belum bisa seluruhnya meyakinkan masyarakat untuk ikut dalam membantu kemajuan Desa Sekapuk.

3. Organisasi Mandiri dan Berjejaring

Konteks organisasi mandiri dan berjejaring dalam implementasi *Adaptive Governance* di BUMDes Desa Sekapuk sudah berjalan baik. Bumdes dapat menjadi arena bagi semua pihak untuk menawarkan gagasan, ide, dan inovasi serta mampu menghasilkan keputusan secara bersama-sama. Hal tersebut didasarkan dimana pada konteks setiap unit usaha proses pemecahan masalah tidak hanya oleh BUMDes saja, tetapi secara bersama sudah mulai dibangun dengan adanya musyawarah jika terjadi permasalahan dan hal ini telah melembaga pada setiap *stakeholder* yang ada.

4. Pembelajaran dan Inovasi

Pembelajaran dan inovasi dalam penerapan implementasi *Adaptive Governance* sudah baik sekali, Bapak Abdul Halim selaku Kepala Desa dan juga para aktor BUMDes Desa Sekapuk belajar banyak dari sebuah pengalaman pada saat itu, BUMDes yang baru saja diaktifkan kembali ini telah berhasil menerapkan sejumlah inovasi yang sukses dan membuat kemajuan untuk Desa Sekapuk.

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa *Adaptive Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik di lihat dari empat dimensi sudah berjalan cukup baik tetapi masih ada beberapa hambatan kegiatan dikarenakan masih terdapat kendala. Dalam unit sektor atau unit usaha seperti Unit Pertambangan, Unit Multi Jasa yang menjadi dan Unit Wisata. Ada beberapa kesulitan atau hambatan yang dialami di sektor kebersihan desa dan PAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini et all. (2023). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bumdes Jaya Mandiri Dalam Peningkatan Usaha Umkm Desa Karang Jaya* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (ed.)). Institut Agama Islam Negeri Curup. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/4161>
- Bumdes Desa Sekapuk. (2021). Website Bumdes Sekapuk, diakses pada 25 Februari 2024. <https://www.bumdessekapuk.com/>
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. (2023). IDM Desa Sekapuk, diakses pada 30 Februari 2024. <https://idm.kemendesa.go.id/>
- Djalante, R., Holley, C., & Thomalla, F. (2011). Adaptive Governance and Managing Resilience to Natural Hazards. *International Journal of Disaster Risk Science*, 2(4), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s13753-011-0015-6>
- Djojo, B. W. (2013). Kompetensi, Pengalaman, Dan Pembelajaran Inovasi Yang Memengaruhi Kemampuan Berinovasi Dan Sukses Kewirausahaan. *Binus Business Review*, Vol. 4 No., 607–618. <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1375>

- Fitriani et all. (2023). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Terhadap Perubahan Iklim dan Adaptasinya. *AKSILAR: Akselerasi Luaran Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–8. <https://journal.unej.ac.id/aksilar/article/view/447>
- Janssen, M., & Voort, H. Van Der. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response : Lessons from the COVID- 19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55(June), 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Desa Wisata Sekapuk, diakses pada 26 Februari 2024. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sekapuk>
- Kurniawan Syofri. (2021). Ini Dia Sekapuk, Desa Miskin yang Kini Berubah Jadi Desa Miliarder dengan PAD Rp 2 Miliar, diakses pada 25 Februari 2024. <https://jateng.tribunnews.com/2021/09/23/ini-dia-sekapuk-desa-miskin-yang-kini-berubah-jadi-desa-miliarder-dengan-pad-rp-2-miliar>.
- Moelong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. https://drive.google.com/file/d/1-HWimTYbLotvY81dB7Bvt_tyZ8TfYGZ7/view
- Mukhlis, M. (2016). Tata Kelola Pemerintah Dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap Dampak Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(2), 1–16. <https://repository.unikom.ac.id/51324/1/1.maulana-mukhlis.pdf>